

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 3296 K/80/MEM/2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL NOMOR 3124 K/80/MEM/2012 TENTANG PENETAPAN
DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH
PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS
BUMI, PERTAMBANGAN PANAS BUMI, DAN PERTAMBANGAN UMUM
(PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA) UNTUK TAHUN 2013**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan asumsi lifting minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3124 K/80/MEM/2012 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi, dan Pertambangan Umum (Pertambangan Mineral dan Batubara) Untuk Tahun 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4595);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5361) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5426);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5047);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5282);
13. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tanggal 24 September 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
14. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;

15. Peraturan ...

15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1022);
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3124 K/80/MEM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi, Dan Pertambangan Umum (Pertambangan Mineral Dan Batubara) Untuk Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2260 K/80/MEM/2013 tanggal 8 Mei 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 3124 K/80/MEM/2012 TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI, PERTAMBANGAN PANAS BUMI, DAN PERTAMBANGAN UMUM (PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA) UNTUK TAHUN 2013.

Pasal I

Ketentuan Diktum Kesatu huruf a, huruf b, Lampiran I, dan Lampiran II Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3124 K/80/MEM/2012 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi, dan Pertambangan Umum (Pertambangan Mineral dan Batubara) Untuk Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2260 K/80/MEM/2013 diubah, sehingga Diktum Kesatu berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan sebagai daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi tahun 2013 untuk masing-masing subsektor adalah sebagai berikut:

- a. pertambangan minyak bumi tahun 2013 sejumlah 7 (tujuh) provinsi, 54 (lima puluh empat) kabupaten dan 6 (enam) kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Ini;

b. pertambangan ...

- b. pertambangan gas bumi tahun 2013 sejumlah 6 (enam) provinsi, 35 (tiga puluh lima) kabupaten, dan 7 (tujuh) kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Ini;
- c. pertambangan panas bumi tahun 2013 yang berasal dari Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi berdasarkan kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya panas bumi dan kuasa perusahaan panas bumi sejumlah 4 (empat) kabupaten serta yang berasal dari Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi sejumlah 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- d. pertambangan umum (pertambangan mineral dan batubara) tahun 2013 sejumlah 2 (dua) provinsi, 260 (dua ratus enam puluh) kabupaten, dan 17 (tujuh belas) kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2013

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,**


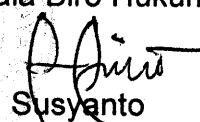
ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
6. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
7. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
8. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
9. Para gubernur yang bersangkutan
10. Para bupati/walikota yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 3296 K/80/MEM/2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 3124 K/80/MEM/2012 TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI, PERTAMBANGAN PANAS BUMI, DAN PERTAMBANGAN UMUM (PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA) UNTUK TAHUN 2013

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI UNTUK TAHUN 2013

NO.	WILAYAH	MINYAK BUMI	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU BAREL)
1	2	3	4
A	Kabupaten/Kota atas pengelolaan di darat dan/atau laut (0 s.d. 4 Mil Laut)	Kabupaten/Kota	252.447,42
I	Aceh		2.653,08
		1 Kab Aceh Timur	2,17
		2 Kab Aceh Utara	938,83
		3 Kab Aceh Tamiang	1.712,08
II.	Sumatera Utara		256,15
		1 Kab Langkat	228,73
		2 Kota Binjai	24,91
		3 Kab Deli Serdang	0,15
		4 Kab Padang Lawas	2,36
III	Riau		126.283,73
		1 Kab Bengkalis	70.553,50
		2 Kab Indragiri Hulu	680,59
		3 Kab Kampar	14.081,04
		4 Kab Rokan Hulu	534,27
		5 Kab Rokan Hilir	17.190,71
		6 Kab Siak	20.786,43
		7 Kab Pelalawan	515,80
		8 Kab Kep Meranti	1.941,39
IV	Kep. Riau		14.100,38
		1 Kab Natuna	9.165,25
		2 Kab Kep Anambas	4.935,13
V	Jambi		9.191,08
		1 Kab Batang Hari	125,83
		2 Kab Muaro Jambi	966,53
		3 Kota Jambi	517,58
		4 Kab Tanjung Jabung Timur	1.821,37
		5 Kab Tanjung Jabung Barat	4.016,04
		6 Kab Sarolangun	1.404,79
		7 Kab Tebo	338,94
VI	Sumatera Selatan		27.659,74
		1 Kab Lahat	320,95
		2 Kab Muara Enim	7.275,29
		3 Kota Prabumulih	550,90

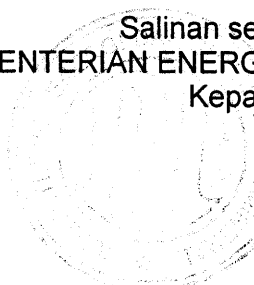

NO.	WILAYAH	GAS BUMI	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU MMBTU)
1	2	3	4
VIII	Jawa Timur		35.995,31
		1 Kab Sumenep	4.746,99
		2 Kab Sidoarjo	2.123,99
		3 Kab Gresik	23.223,69
		4 Kab Bangkalan	1.287,03
		5 Kab Bojonegoro	4.613,61
IX	Jawa Tengah		1.139,60
		1 Kota Semarang	1.095,37
		2 Kab Blora	44,23
X	Kalimantan Timur		478.581,35
		1 Kab Bulungan	1.003,17
		2 Kota Tarakan	67,00
		3 Kota Samarinda	1.763,50
		4 Kab Kutai Kartanegara	467.301,93
		5 Kab Penajam Paser Utara	4.907,18
		6 Kota Bontang	2.822,47
		7 Kab Nunukan	716,10
XI	Sulawesi Selatan	Kab Wajo	13.052,99
XII	Papua Barat		359.379,63
		1 Kab Sorong	1.254,11
		2 Kab Teluk Bintuni	358.125,52
B	Provinsi atas pengelolaan di Laut (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut)	Provinsi	499.580,53
		1 Jawa Barat	28.052,80
		2 Kalimantan Timur	312.835,06
		3 Kep Riau	84.615,25
		4 Jawa Timur	65.444,90
		5 Lampung	4.088,07
		6 DKI Jakarta	4.544,45
C	Pemerintah Pusat atas pengelolaan di Laut lebih dari 12 Mil Laut	Pemerintah Pusat	253.997,17

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 3296 K/80/MEM/2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN
 SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 3124 K/80/MEM/2012
 TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR
 PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA
 ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI,
 PERTAMBANGAN PANAS BUMI, DAN PERTAMBANGAN UMUM
 (PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA) UNTUK TAHUN 2013

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL
 SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2013

NO.	WILAYAH	GAS BUMI	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU MMBTU)
1	2	3	4
A	Kabupaten/Kota atas pengelolaan di darat dan/atau laut (0 s.d. 4 Mil Laut)	Kabupaten/Kota	1.865.270,25
I	Aceh		19.003,45
		1 Kab Aceh Timur	519,67
		2 Kab Aceh Utara	18.483,78
II	Sumatera Utara		3.469,10
		1 Kab Langkat	3.069,50
		2 Kota Binjai	306,84
		3 Kab Deli Serdang	92,76
III	Riau		11.077,79
		1 Kab Palalawan	9.746,44
		2 Kab Kep Meranti	66,74
		3 Kab Kampar	1.264,61
IV	Kep. Riau		138.779,56
		1 Kab Natuna	90.206,71
		2 Kab Kep Anambas	48.572,85
V	Jambi		67.558,16
		1 Kab Tanjung Jabung Timur	23.295,92
		2 Kab Tanjung Jabung Barat	43.258,64
		3 Kab Muaro Jambi	344,58
		4 Kota Jambi	659,02
VI	Sumatera Selatan		612.990,23
		1 Kab Lahat	14.595,51
		2 Kab Muara Enim	61.565,49
		3 Kota Prabumulih	2.563,72
		4 Kab Musi Banyuasin	399.012,18
		5 Kab Musi Rawas	130.206,61
		6 Kab Ogan Komering Ulu	5.046,72
VII	Jawa Barat		124.243,08
		1 Kab Indramayu	19.090,12
		2 Kab Karawang	31.121,66
		3 Kab Majalengka	992,71
		4 Kab Subang	49.017,86
		5 Kab Bekasi	24.020,73

NO.	WILAYAH	MINYAK BUMI	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU BAREL)
1	2	3	4
		4 Kab Musi Banyuasin	12.653,77
		5 Kab Banyuasin	1.725,47
		6 Kab Musi Rawas	2.358,70
		7 Kab Ogan Ilir	1.212,59
		8 Kab Ogan Komering Ulu	1.562,07
VII	Lampung	Kab Lampung Timur	2.878,54
VIII	Jawa Barat		5.467,65
		1 Kab Indramayu	1.970,33
		2 Kab Karawang	909,70
		3 Kab Majalengka	176,66
		4 Kab Subang	141,07
		5 Kab Bekasi	2.269,89
IX	Jawa Tengah	Kab Blora	233,75
X	Jawa Timur		26.637,97
		1 Kab Bojonegoro	21.865,42
		2 Kab Bangkalan	1.163,51
		3 Kab Sumenep	49,36
		4 Kab Tuban	549,45
		5 Kab Gresik	3.003,27
		6 Kab Sidoarjo	6,96
XI	Kalimantan Selatan		1.604,63
		1 Kab Tabalong	1.542,56
		2 Kab Balangan	62,07
XII	Kalimantan Timur		28.048,58
		1 Kab Bulungan	2.554,66
		2 Kab Nunukan	666,95
		3 Kota Tarakan	1.002,68
		4 Kota Samarinda	190,49
		5 Kab Kutai Kartanegara	20.811,86
		6 Kab Kutai Timur	412,27
		7 Kab Penajam Paser Utara	1.155,70
		8 Kota Bontang	1.236,21
		9 Kab Tana Tidung	17,76
XIII	Sulawesi Tengah	Kab Morowali	564,58
XIV	Maluku	Kab Seram Bagian Timur	1.092,78
XV	Papua Barat		5.774,78
		1 Kab Teluk Bintuni	2.605,86
		2 Kab Sorong	3.168,92
B	Provinsi atas pengelolaan di Laut (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut)	Provinsi	35.783,72
		1 Lampung	4.570,45
		2 Kep Bangka Belitung	559,63
		3 Jawa Barat	6.144,01
		4 Kalimantan Timur	17.492,17
		5 Kep Riau	838,25
		6 Jawa Timur	1.562,37
		7 DKI Jakarta	4.616,84

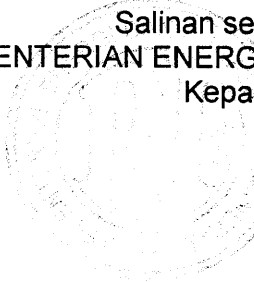
NO.	WILAYAH	MINYAK BUMI	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU BAREL)
1	2	3	4
C	Pemerintah Pusat atas pengelolaan di Laut lebih dari 12 Mil Laut	Pemerintah Pusat	18.368,84

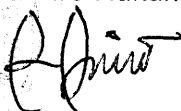
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,




Susyanto

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 3296 K/80/MEM/2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 3124 K/80/MEM/2012 TENTANG
PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN
BAGIAN DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI, PERTAMBANGAN
PANAS BUMI, DAN PERTAMBANGAN UMUM (PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA) UNTUK TAHUN 2013

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI YANG BERASAL DARI
WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI BERDASARKAN KONTRAK
OPERASI BERSAMA PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI DAN
KUASA PENGUSAHAAN PANAS BUMI UNTUK TAHUN 2013

No.	Area / Kabupaten	Pengembang	Nilai Persentase Bagian Daerah (%)
1	2	3	4
I	Gunung Salak	Chevron Geothermal Salak, Ltd.	
1	Kabupaten Sukabumi		42,64
2	Kabupaten Bogor		57,36
II	Darajat	Chevron Geothermal Indonesia, Ltd.	
1	Kabupaten Garut		94,51
2	Kabupaten Bandung		5,49
III	Kamojang	PT Pertamina Geothermal Energi (PGE)	
1	Kabupaten Bandung		86,14
2	Kabupaten Garut		13,86
IV	Wayang Windu		
	Kabupaten Bandung	Star Energy (Wayang Windu), Ltd.	100,00

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 3296 K/80/MEM/2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN
 SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 3124 K/80/MEM/2012
 TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR
 PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA
 ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI,
 PERTAMBANGAN PANAS BUMI, DAN PERTAMBANGAN UMUM
 (PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA) UNTUK TAHUN 2013

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL
 SUMBER DAYA PERTAMBANGAN PANAS BUMI YANG BERASAL DARI IZIN USAHA
 PERTAMBANGAN PANAS BUMI UNTUK TAHUN 2013

No.	Provinsi	Daerah Penghasil	Iuran Tetap (Rp)
1	2	3	4
I	Aceh	Kota Sabang	129.251.400
II	Sumatera Utara	Kab. Mandailing Natal	1.169.940.000
III	Sumatera Barat	Kab. Solok Selatan	1.158.780.000
IV	Sumatera Selatan		659.556.000
		1 Kab. Lahat	163.240.110
		2 Kab. Muara Enim	420.335.039
		3 Kota Pagar Alam	75.980.851
V	Lampung		956.579.400
		1 Kab. Lampung Barat	593.507.400
		2 Kab. Lampung Selatan	363.072.000
VI	Jawa Barat		1.623.780.000
		1 Kab. Subang	411.996.919
		2 Kab. Sumedang	484.902.967
		3 Kab. Sukabumi	289.788.000
		4 Kab. Purwakarta	192.100.986
		5 Kab. Bandung Barat	244.991.128
VII	Banten		1.938.120.000
		1 Kab. Pandeglang	978.169.164
		2 Kab. Serang	959.950.836
VIII	Jawa Tengah		1.280.052.000
		1 Kab. Semarang	497.189.160
		2 Kab. Kendal	57.090.840
		3 Kab. Pemalang	64.786.702
		4 Kab. Tegal	162.730.879
		5 Kab. Brebes	140.441.272
		6 Kab. Purbalingga	49.215.935
		7 Kab. Banyumas	308.597.212

No.	Provinsi	Daerah Penghasil	Iuran Tetap (Rp)
1	2	3	4
IX	Jawa Timur		1.956.534.000
		1 Kab. Banyuwangi	773.614.994
		2 Kab. Situbondo	6.522.499
		3 Kab. Bondowoso	384.594.506
		4 Kab. Madiun	266.758.094
		5 Kab. Ponorogo	525.043.906
X	Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	359.166.000
XI	Nusa Tenggara Timur		1.372.122.000
		1 Kab. Lembata	580.320.000
		2 Kab. Ende	791.802.000
XII	Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	252.588.000
Total			12.856.468.800

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 3296 K/80/MEM/2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 3124 K/80/MEM/2012 TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI, PERTAMBANGAN PANAS BUMI, DAN PERTAMBANGAN UMUM (PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA) UNTUK TAHUN 2013

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM (PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA) UNTUK TAHUN 2013

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		Jumlah (Rp)
			Iuran Tetap (Rp)	Iuran Produksi (Royalti) (Rp)	
1	2	3	4	5	6
I	Nanggroe Aceh Darussalam		15.693.469.500	2.666.000.000	18.359.469.500
1	Kab. Aceh Tengah	IUP	4.389.862.400	-	4.389.862.400
2	Kab. Nagan Raya	IUP	2.607.832.600	-	2.607.832.600
3	Kab. Pidie	IUP, KK	2.026.681.700	66.000.000	2.092.681.700
4	Kab. Aceh Barat	IUP, KK	1.627.105.800	450.000.000	2.077.105.800
5	Kab. Gayo Lues	IUP	1.997.714.800	-	1.997.714.800
6	Kab. Aceh Besar	IUP	39.527.000	1.100.000.000	1.139.527.000
7	Kab. Aceh Selatan	IUP	1.138.763.400	-	1.138.763.400
8	Kab. Aceh Barat Daya	IUP	38.080.000	1.050.000.000	1.088.080.000
9	Kab. Aceh Tenggara	IUP	741.988.800	-	741.988.800
10	Kota Subulussalam	IUP	309.281.900	-	309.281.900
11	Kab. Aceh Jaya	IUP	274.556.800	-	274.556.800
12	Kab. Bireun	IUP	190.400.400	-	190.400.400
13	Kab. Aceh Timur	IUP	111.955.200	-	111.955.200
14	Kab. Aceh Utara	IUP	87.584.000	-	87.584.000
15	Kab. Aceh Tamiang	IUP	60.604.300	-	60.604.300
16	Kab. Pidie Jaya	IUP	50.684.400	-	50.684.400
17	Kab. Aceh Singkil	KK	846.000	-	846.000
					-
II	Sumatera Utara		7.700.396.000	21.089.076.000	28.789.472.000
1	Kab. Tapanuli Selatan	KK	496.300.000	21.089.076.000	21.585.376.000
2	Kab. Mandailing Natal	IUP, KK	2.980.141.800	-	2.980.141.800
3	Kab. Tapanuli Utara	IUP, KK	2.576.065.300	-	2.576.065.300
4	Kota Padang Sidempuan	KK	495.225.000	-	495.225.000
5	Kab. Dairi	IUP, KK	452.502.000	-	452.502.000
6	Kab. Toba Samosir	IUP	303.497.700	-	303.497.700
7	Kab. Tapanuli Tengah	KK	236.610.000	-	236.610.000
8	Kab. Karo	IUP	155.671.200	-	155.671.200
9	Kab. Pakpak Bharat	KK	4.383.000	-	4.383.000
					-
III	Sumatera Barat		5.806.146.500	42.167.600.000	47.973.746.500
1	Kota Sawahlunto	IUP	216.899.900	27.650.000.000	27.866.899.900
2	Kab. Dharmasraya	IUP	456.327.800	7.408.000.000	7.864.327.800
3	Kab. Solok Selatan	IUP	1.180.097.300	2.960.000.000	4.140.097.300
4	Kab. Sijunjung	IUP	124.741.700	3.385.900.000	3.510.641.700
5	Kab. Pasaman	IUP	1.933.460.900	-	1.933.460.900
6	Kab. Solok	IUP	824.451.000	217.000.000	1.041.451.000
7	Kab. Pesisir Selatan	IUP	412.725.300	420.000.000	832.725.300
8	Kab. Pasaman Barat	IUP	456.285.900	-	456.285.900
9	Kab. Lima Puluh Kota	IUP	136.261.600	126.700.000	262.961.600
10	Kab. Tanah Datar	IUP	38.783.600	-	38.783.600
11	Kab. Agam	IUP	21.439.000	-	21.439.000
12	Kota Padang	IUP	4.672.500	-	4.672.500
					-
IV	Riau		8.094.179.000	32.694.000.000	40.788.179.000
1	Kab. Indragiri Hulu	IUP, PKP2B	4.375.712.400	20.140.000.000	24.515.712.400
2	Kab. Kuantan Singingi	IUP, PKP2B	1.379.077.900	8.592.000.000	9.971.077.900
3	Kab. Indragiri Hilir	IUP, PKP2B	331.495.000	3.962.000.000	4.293.495.000
4	Kab. Kampar	IUP	1.305.001.600	-	1.305.001.600
5	Kab. Meranti	IUP	484.434.700	-	484.434.700
6	Kab. Rokan Hulu	IUP	210.582.400	-	210.582.400
7	Kab. Pelalawan	PKP2B	7.875.000	-	7.875.000
					-
V	Kepulauan Riau		8.260.824.500	87.246.200.000	95.507.024.500
1	Provinsi Kepulauan Riau	IUP	5.468.045.600	13.159.000.000	18.627.045.600
2	Kab. Bintan	IUP	140.553.600	31.200.000.000	31.340.553.600
3	Kab. Karimun	IUP, KK	1.267.293.700	21.130.000.000	22.397.293.700
4	Kota Tanjung Pinang	IUP	110.670.700	13.361.000.000	13.471.670.700
5	Kab. Lingga	IUP	1.274.260.900	8.396.200.000	9.670.460.900

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Iuran Tetap (Rp)	Iuran Produksi (Royalti) (Rp)	Jumlah (Rp)
VI	Jambi		19.026.971.000	84.657.991.000	103.684.962.000
1	Kab. Bungo	IUP, PKP2B	955.104.300	49.046.726.000	50.001.830.300
2	Kab. Batang Hari	IUP, PKP2B	4.248.718.500	14.596.290.000	18.845.008.500
3	Kab. Sarolangun	IUP, PKP2B	4.710.398.600	11.182.370.000	15.892.768.600
4	Kab. Merangin	IUP	1.077.492.600	7.675.000.000	8.752.492.600
5	Kab. Tebo	IUP	2.696.517.100	950.000.000	3.646.517.100
6	Kab. Muaro Jambi	IUP	2.829.896.300	592.895.000	3.422.791.300
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	IUP	2.508.843.600	614.710.000	3.123.553.600
VII	Sumatera Selatan		61.490.458.500	980.072.534.000	1.041.562.992.500
1	Kab. Muara Enim	IUP, PKP2B	12.375.007.900	440.495.121.000	452.870.128.900
2	Kab. Lahat	IUP, PKP2B	2.779.779.600	322.648.695.000	325.428.474.600
3	Kab. Musi Banyuasin	IUP, PKP2B	11.199.398.200	154.758.716.000	165.958.114.200
4	Kab. Banyuasin	IUP, PKP2B	5.330.976.700	41.628.000.000	46.958.976.700
5	Kab. Ogan Komering Ulu	IUP, PKP2B	3.466.333.200	17.691.387.000	21.157.720.200
6	Kab. Musi Rawas	IUP, KK, PKP2B	7.742.176.700	1.435.000.000	9.177.176.700
7	Kab. Ogan Komering Ilir	IUP	9.122.480.900	-	9.122.480.900
8	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	IUP, PKP2B	3.305.364.000	200.615.000	3.505.979.000
9	Kab. Empat Lawang	IUP	2.270.101.500	-	2.270.101.500
10	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	IUP	1.861.064.800	-	1.861.064.800
11	Kota Prabumulih	IUP, PKP2B	473.639.000	1.215.000.000	1.688.639.000
12	Kab. Ogan Ilir	IUP	1.564.136.000	-	1.564.136.000
VIII	Kepulauan Bangka Belitung		28.422.315.500	451.670.599.000	480.092.914.500
1	Provinsi Kep. Bangka Belitung	IUP	11.712.631.200	-	11.712.631.200
2	Kab. Bangka	IUP	3.898.549.700	188.150.000.000	192.048.549.700
3	Kab. Bangka Tengah	IUP, KK	1.648.318.700	108.009.960.000	109.658.278.700
4	Kab. Bangka Barat	IUP	4.450.467.500	75.042.501.000	79.492.968.500
5	Kab. Bangka Selatan	IUP	2.683.778.400	33.547.861.000	36.231.639.400
6	Kab. Belitung Timur	IUP	2.810.172.600	28.643.480.000	31.453.652.600
7	Kab. Belitung	IUP	1.209.302.400	18.276.797.000	19.486.099.400
8	Kota Pangkal Pinang	IUP	9.095.000	-	9.095.000
IX	Bengkulu		11.348.800.500	153.362.082.000	164.710.882.500
1	Kab. Bengkulu Tengah	IUP	1.478.496.800	86.860.568.000	88.339.064.800
2	Kab. Bengkulu Utara	IUP	4.465.554.300	66.016.790.000	70.482.344.300
3	Kab. Kaur	IUP	1.817.450.200	484.724.000	2.302.174.200
4	Kab. Seluma	IUP	1.816.716.400	-	1.816.716.400
5	Kab. Mukomuko	IUP	986.786.000	-	986.786.000
6	Kab. Lebong	IUP	439.744.000	-	439.744.000
7	Kab. Bengkulu Selatan	IUP	344.052.800	-	344.052.800
X	Lampung		4.284.724.500	24.323.000.000	28.607.724.500
1	Kab. Tanggamus	IUP, KK	484.424.800	24.323.000.000	24.807.424.800
2	Kab. Mesuji	IUP	1.931.265.300	-	1.931.265.300
3	Kab. Tulang Bawang	IUP	1.103.196.800	-	1.103.196.800
4	Kab. Pesawaran	IUP	271.886.300	-	271.886.300
5	Kab. Way Kanan	IUP, PKP2B	143.265.000	-	143.265.000
6	Kab. Lampung Utara	IUP	130.658.200	-	130.658.200
7	Kab. Lampung Tengah	IUP	83.585.600	-	83.585.600
8	Kab. Lampung Selatan	IUP	49.199.400	-	49.199.400
9	Kab. Lampung Barat	IUP, KK	44.966.700	-	44.966.700
10	Kab. Pringsewu	IUP	42.276.400	-	42.276.400
XI	Jawa Barat		3.204.980.500	42.211.361.000	45.416.341.500
1	Kab. Bogor	IUP	342.370.500	38.742.265.000	39.084.635.500
2	Kab. Tasikmalaya	IUP	137.631.000	3.321.952.000	3.459.583.000
3	Kab. Cianjur	IUP	864.495.900	25.644.000	890.139.900
4	Kab. Garut	IUP	869.080.800	-	869.080.800
5	Kab. Sukabumi	IUP	577.547.900	121.500.000	699.047.900
6	Kab. Ciamis	IUP	408.712.900	-	408.712.900
7	Kab. Purwakarta	IUP	5.141.500	-	5.141.500
XII	Banten		1.168.239.500	18.379.147.000	19.547.386.500
1	Kab. Pandeglang	IUP	174.558.800	17.338.947.000	17.513.505.800
2	Kab. Lebak	IUP	993.680.700	1.040.200.000	2.033.880.700
XIII	Jawa Tengah		846.330.700	8.013.032.000	8.859.362.700
1	Kab. Cilacap	IUP	38.268.500	7.452.000.000	7.490.268.500
2	Kab. Jepara	IUP	11.957.100	521.000.000	532.957.100
3	Kab. Banyumas	IUP	402.353.300	-	402.353.300
4	Kab. Wonogiri	IUP	355.103.600	40.032.000	395.135.600
5	Kab. Kebumen	IUP	38.648.200	-	38.648.200
XIV	Daerah Istimewa Yogyakarta		156.956.000	4.505.625.000	4.662.581.000
1	Kab. Kulonprogo	IUP, KK	156.956.000	4.505.625.000	4.662.581.000
XV	Jawa Timur		1.345.604.500	529.000.000	1.874.604.500
1	Kab. Trenggalek	IUP	592.807.200	80.376.000	673.183.200
2	Kab. Lumajang	IUP	293.200.700	75.000.000	368.200.700
3	Kab. Banyuwangi	IUP	316.647.900	27.370.000	344.017.900
4	Kab. Pacitan	IUP	80.482.000	97.593.000	178.075.000
5	Kab. Blitar	IUP	3.255.000	166.758.000	170.013.000
6	Kab. Jember	IUP	58.604.300	55.063.000	113.667.300
7	Kab. Tulung Agung	IUP	607.400	26.840.000	27.447.400

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Iuran Tetap (Rp)	Iuran Produksi (Royalti) (Rp)	Jumlah (Rp)
					-
XVI	Kalimantan Barat		77.821.034.000	108.342.323.000	186.163.357.000
1	Kab. Ketapang	IUP	25.454.326.800	84.013.777.000	109.468.103.800
2	Kab. Sanggau	IUP	11.998.893.000	24.259.880.000	36.258.773.000
3	Kab. Kapuas Hulu	IUP	10.935.707.700	-	10.935.707.700
4	Kab. Melawi	IUP	9.664.936.300	-	9.664.936.300
5	Kab. Landak	IUP	6.844.337.400	-	6.844.337.400
6	Kab. Sintang	IUP, KK, PKP2B	5.289.486.800	-	5.289.486.800
7	Kab. Kayong Utara	IUP	3.206.791.000	-	3.206.791.000
8	Kab. Kubu Raya	IUP	1.683.631.000	-	1.683.631.000
9	Kab. Pontianak	IUP	1.370.746.700	-	1.370.746.700
10	Kab. Bengkayang	IUP	874.754.700	68.666.000	943.420.700
11	Kab. Sambas	IUP	316.542.600	-	316.542.600
12	Kab. Sekadau	IUP	180.880.000	-	180.880.000
					-
XVII	Kalimantan Tengah		68.947.106.000	696.232.833.000	765.179.939.000
1	Kab. Murung Raya	IUP, KK, PKP2B	12.328.581.700	295.705.782.000	308.034.363.700
2	Kab. Kapuas	IUP, KK, PKP2B	10.020.687.900	177.346.947.000	187.367.634.900
3	Kab. Barito Utara	IUP, PKP2B	16.384.474.200	91.989.015.000	108.373.489.200
4	Kab. Barito Timur	IUP, PKP2B	7.001.393.000	67.756.732.000	74.758.125.000
5	Kab. Barito Selatan	IUP, PKP2B	3.386.364.300	31.500.000.000	34.886.364.300
6	Kab. Katingan	IUP, KK	3.589.455.400	22.094.034.500	25.683.489.900
7	Kab. Lamandau	IUP	2.912.605.900	6.723.000.000	9.635.605.900
8	Kab. Gunung Mas	IUP, KK	8.881.131.700	190.012.000	9.071.143.700
9	Kab. Kotawaringin Timur	IUP	1.395.279.700	2.291.351.000	3.686.630.700
10	Kab. Seruyan	IUP, KK	1.121.655.300	607.486.500	1.729.141.800
11	Kab. Sukamara	IUP	1.115.724.900	-	1.115.724.900
12	Kota Palangka Raya	IUP	410.883.200	28.473.000	439.356.200
13	Kab. Kotawaringin Barat	IUP, KK	398.868.800	-	398.868.800
					-
XVIII	Kalimantan Selatan		27.885.011.500	3.486.641.887.000	3.514.526.898.500
1	Kab. Tanah Bumbu	IUP, KK, PKP2B	6.918.142.200	639.068.630.000	645.986.772.200
2	Kab. Balangan	IUP, PKP2B	1.553.544.700	636.480.000.000	638.033.544.700
3	Kab. Tanah Laut	IUP, KK, PKP2B	3.237.239.100	587.145.040.000	590.382.279.100
4	Kab. Tabalong	IUP, PKP2B	2.443.487.900	533.520.000.000	535.963.487.900
5	Kab. Kotabaru	IUP, KK, PKP2B	10.591.483.900	503.808.750.000	514.400.233.900
6	Kab. Tapin	IUP, PKP2B	843.178.700	318.886.642.000	319.729.820.700
7	Kab. Banjar	IUP, KK, PKP2B	1.446.014.500	201.897.321.000	203.343.335.500
8	Kab. Hulu Sungai Selatan	IUP, PKP2B	501.919.500	48.600.000.000	49.101.919.500
9	Kota Banjarbaru	KK, PKP2B	228.933.000	17.235.504.000	17.464.437.000
10	Kab. Hulu Sungai Tengah	PKP2B	121.068.000	-	121.068.000
					-
XIX	Kalimantan Timur		130.608.976.500	7.939.061.934.000	8.069.670.910.500
1	Kab. Kutai Timur	IUP, PKP2B	26.676.868.000	3.248.830.809.000	3.275.507.677.000
2	Kab. Kutai Kartanegara	IUP, PKP2B	24.264.177.800	2.127.055.171.000	2.151.319.348.800
3	Kab. Berau	IUP, PKP2B	7.384.282.900	760.308.096.000	767.692.378.900
4	Kab. Paser	IUP, PKP2B	3.656.078.800	722.185.241.000	725.841.319.800
5	Kab. Kutai Barat	IUP, KK, PKP2B	34.005.625.300	497.151.952.000	531.157.577.300
6	Kota Samarinda	IUP, PKP2B	1.351.909.900	237.870.203.000	239.222.112.900
7	Kab. Nunukan	IUP, PKP2B	2.126.281.800	188.263.078.000	190.389.359.800
8	Kab. Malinau	IUP	11.276.497.100	88.487.190.000	99.763.687.100
9	Kab. Bulungan	IUP, PKP2B	13.568.253.200	57.086.215.000	70.654.468.200
10	Kab. Penajam Paser Utara	IUP	4.891.695.800	6.636.139.000	11.527.834.800
11	Kab. Tana Tidung	IUP	1.385.003.900	5.187.840.000	6.572.843.900
12	Kota Bontang	PKP2B	22.302.000	-	22.302.000
					-
XX	Nusa Tenggara Barat		12.219.733.500	72.157.803.000	84.377.536.500
1	Kab. Sumbawa Barat	IUP, KK	2.683.779.700	72.157.803.000	74.841.582.700
2	Kab. Sumbawa	IUP, KK	5.362.627.200	-	5.362.627.200
3	Kab. Bima	IUP, KK	2.710.163.300	-	2.710.163.300
4	Kab. Dompu	IUP, KK	1.107.714.600	-	1.107.714.600
5	Kab. Lombok Barat	IUP	355.391.500	-	355.391.500
6	Kab. Lombok Timur	IUP	57.200	-	57.200
					-
XXI	Nusa Tenggara Timur		12.807.913.000	2.315.258.000	15.123.171.000
1	Kab. Timor Tengah Utara	IUP	2.030.368.400	774.437.000	2.804.805.400
2	Kab. Belu	IUP	2.050.229.100	698.070.000	2.748.299.100
3	Kab. Timor Tengah Selatan	IUP	808.457.500	842.751.000	1.651.208.500
4	Kab. Nage Keo	IUP	1.313.996.000	-	1.313.996.000
5	Kab. Sumba Timur	IUP	941.946.800	-	941.946.800
6	Kab. Kupang	IUP	882.332.700	-	882.332.700
7	Kab. Sumba Barat Daya	IUP	882.313.600	-	882.313.600
8	Kab. Ende	IUP	812.680.500	-	812.680.500
9	Kab. Sumba Tengah	IUP	777.403.200	-	777.403.200
10	Kab. Sumba Barat	IUP	528.360.000	-	528.360.000
11	Kab. Ngada	IUP	429.014.900	-	429.014.900
12	Kab. Manggarai	IUP	385.266.700	-	385.266.700
13	Kab. Alor	IUP	346.623.400	-	346.623.400
14	Kab. Rote Ndao	IUP	294.175.700	-	294.175.700
15	Kab. Manggarai Timur	IUP	248.584.500	-	248.584.500
16	Kab. Sabu Raijua	IUP	76.160.000	-	76.160.000

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Iuran Tetap (Rp)	Iuran Produksi (Royalti) (Rp)	Jumlah (Rp)
XXII	Sulawesi Utara		7.280.577.000	49.449.417.000	56.729.994.000
1	Kab. Minahasa Utara	IUP, KK	385.362.300	44.182.800.000	44.568.162.300
2	Kab. Bolaang Mongondow Timur	IUP, KK	2.292.161.000	3.003.437.000	5.295.598.000
3	Kota Bitung	KK	11.551.500	2.263.180.000	2.274.731.500
4	Kab. Bolaang Mongondow Utara	IUP, KK	1.587.851.100	-	1.587.851.100
5	Kab. Kepulauan Talaud	IUP	909.616.900	-	909.616.900
6	Kab. Minahasa Selatan	IUP, KK	887.891.700	-	887.891.700
7	Kab. Minahasa Tenggara	KK	533.215.200	-	533.215.200
8	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	IUP	306.924.800	-	306.924.800
9	Kab. Bolaang Mongondow	IUP, KK	270.393.000	-	270.393.000
10	Kab. Kepulauan Sangihe	IUP	95.200.000	-	95.200.000
11	Kota Manado	KK	409.500	-	409.500
XXIII	Gorontalo		5.020.450.700	-	5.020.450.700
1	Kab. Pohuwato	IUP, KK	1.618.326.800	-	1.618.326.800
2	Kab. Gorontalo	IUP, KK	1.491.812.800	-	1.491.812.800
3	Kab. Gorontalo Utara	IUP	1.028.807.400	-	1.028.807.400
4	Kab. Bone Bolango	IUP, KK	787.065.300	-	787.065.300
5	Kab. Boalemo	IUP	94.438.400	-	94.438.400
XXIV	Sulawesi Tengah		36.375.690.000	54.529.852.000	90.905.542.000
1	Kab. Morowali	IUP, KK	12.727.764.400	45.835.265.000	58.563.029.400
2	Kab. Banggai	IUP	4.294.034.200	7.726.382.000	12.020.416.200
3	Kab. Tojo Una-Una	IUP	6.148.248.300	968.205.000	7.116.453.300
4	Kab. Toli-Toli	IUP, KK	3.114.591.600	-	3.114.591.600
5	Kab. Donggala	IUP, KK	3.007.242.500	-	3.007.242.500
6	Kab. Poso	IUP	2.742.578.800	-	2.742.578.800
7	Kab. Parigi Moutong	IUP, KK	2.346.692.800	-	2.346.692.800
8	Kab. Buol	IUP, KK	1.421.760.900	-	1.421.760.900
9	Kota Palu	KK	343.224.600	-	343.224.600
10	Kab. Sigi	IUP, KK	229.551.900	-	229.551.900
XXV	Sulawesi Selatan		10.864.352.000	61.868.715.000	72.733.067.000
1	Kab. Luwu Timur	IUP, KK	2.306.120.700	60.904.037.000	63.210.157.700
2	Kab. Luwu Utara	IUP, KK	3.155.313.200	-	3.155.313.200
3	Kab. Kepulauan Selayar	IUP	1.510.728.800	-	1.510.728.800
4	Kab. Luwu	IUP, KK	1.328.880.500	-	1.328.880.500
5	Kab. Sinjai	IUP	911.587.600	-	911.587.600
6	Kab. Maros	IUP	176.319.900	523.478.000	699.797.900
7	Kab. Barru	IUP	223.834.300	240.000.000	463.834.300
8	Kab. Takalar	IUP	150.336.000	201.200.000	351.536.000
9	Kab. Bone	IUP	293.006.600	-	293.006.600
10	Kab. Enrekang	IUP, KK	262.476.800	-	262.476.800
11	Kota Palopo	IUP	247.520.000	-	247.520.000
12	Kab. Sidenreng Rappang	KK	119.745.000	-	119.745.000
13	Kab. Tana Toraja	IUP	108.528.000	-	108.528.000
14	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	IUP	39.184.400	-	39.184.400
15	Kab. Toraja Utara	IUP	18.583.200	-	18.583.200
16	Kab. Wajo	KK	8.379.000	-	8.379.000
17	Kab. Soppeng	IUP	3.808.000	-	3.808.000
XXVI	Sulawesi Barat		10.776.240.000	1.776.600.000	12.552.840.000
1	Kab. Mamuju	IUP	9.572.931.000	-	9.572.931.000
2	Kab. Polewali Mandar	IUP	242.664.800	1.776.600.000	2.019.264.800
3	Kab. Mamasa	IUP	501.646.900	-	501.646.900
4	Kab. Mamuju Utara	IUP	380.800.000	-	380.800.000
5	Kab. Majene	IUP	78.197.300	-	78.197.300
XXVII	Sulawesi Tenggara		21.853.006.500	239.009.771.000	260.862.777.500
1	Kab. Kolaka	IUP, KK	1.258.556.500	114.574.434.000	115.832.990.500
2	Kab. Bombana	IUP, KK	5.486.296.300	34.877.305.000	40.363.601.300
3	Kab. Konawe Utara	IUP	5.369.482.700	32.144.084.000	37.513.566.700
4	Kab. Kolaka Utara	IUP, KK	1.549.046.900	31.632.464.000	33.181.510.900
5	Kab. Konawe Selatan	IUP, KK	1.601.441.400	23.493.005.000	25.094.446.400
6	Kab. Konawe	IUP, KK	4.013.028.400	2.225.746.000	6.238.774.400
7	Kab. Buton	IUP	1.769.981.200	62.733.000	1.832.714.200
8	Kab. Buton Utara	IUP	476.422.800	-	476.422.800
9	Kab. Muna	IUP	191.504.300	-	191.504.300
10	Kota Bau-Bau	IUP	137.246.000	-	137.246.000
XXVIII	Maluku		10.236.081.500	62.300.000	10.298.381.500
1	Kab. Maluku Barat Daya	IUP	5.669.179.000	62.300.000	5.731.479.000
2	Kab. Seram Bagian Barat	IUP	2.363.816.000	-	2.363.816.000
3	Kab. Maluku Tenggara Barat	IUP	1.196.378.400	-	1.196.378.400
4	Kab. Buru Selatan	IUP	673.641.300	-	673.641.300
5	Kab. Maluku Tengah	IUP	333.066.800	-	333.066.800
XXIX	Maluku Utara		26.299.825.500	244.732.686.000	271.032.511.500
1	Kab. Halmahera Timur	IUP	4.062.605.800	155.431.774.000	159.494.379.800
2	Kab. Halmahera Selatan	IUP	5.970.912.400	54.800.521.000	60.771.433.400
3	Kab. Halmahera Utara	IUP, KK	3.010.959.300	24.426.992.000	27.437.951.300
4	Kab. Halmahera Tengah	IUP, KK	3.189.752.000	10.073.399.000	13.263.151.000
5	Kab. Kepulauan Sula	IUP	8.183.911.000	-	8.183.911.000
6	Kota Tidore Kepulauan	IUP	837.169.700	-	837.169.700
7	Kab. Halmahera Barat	IUP	829.953.600	-	829.953.600
8	Kab. Morotai	IUP	214.561.700	-	214.561.700

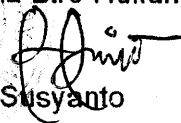
No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Iuran Tetap (Rp)	Iuran Produksi (Royalti) (Rp)	Jumlah (Rp)
					-
XXX	Papua		54.893.964.600	1.952.385.300.000	2.006.979.264.600
1	Kab. Mimika	IUP, KK	2.100.393.400	1.952.385.300.000	1.954.485.693.400
2	Kab. Yahukimo	IUP	11.881.761.600	-	11.881.761.600
3	Kab. Mamberamo Raya	IUP	8.833.189.100	-	8.833.189.100
4	Kab. Puncak Jaya	IUP, KK	5.706.678.700	-	5.706.678.700
5	Kab. Keerom	IUP, KK	5.222.721.400	-	5.222.721.400
6	Kab. Sarmi	IUP, KK	4.333.855.000	-	4.333.855.000
7	Kab. Pegunungan Bintang	KK	3.931.177.800	-	3.931.177.800
8	Kab. Nabire	IUP, KK	3.340.465.900	-	3.340.465.900
9	Kab. Paniai	IUP, KK	3.003.501.900	-	3.003.501.900
10	Kab. Waropen	IUP, KK	2.692.030.600	-	2.692.030.600
11	Kab. Jayapura	IUP	1.860.398.400	-	1.860.398.400
12	Kab. Boven Digoel	IUP	1.372.403.200	-	1.372.403.200
13	Kab. Tolikara	KK	257.517.000	-	257.517.000
14	Kab. Jayawijaya	IUP, KK	57.870.600	-	57.870.600
					-
XXXI	Papua Barat		39.203.011.000	7.215.299.000	46.418.310.000
1	Kab. Teluk Bintuni	IUP	10.468.153.100	-	10.468.153.100
2	Kab. Raja Ampat	IUP, KK	2.641.626.000	7.215.299.000	9.856.925.000
3	Kab. Manokwari	IUP	9.060.355.000	-	9.060.355.000
4	Kab. Teluk Wondama	IUP	5.708.725.100	-	5.708.725.100
5	Kab. Fakfak	IUP	5.519.696.000	-	5.519.696.000
6	Kab. Sorong	IUP	2.119.437.200	-	2.119.437.200
7	Kab. Tambrau	IUP	2.057.523.200	-	2.057.523.200
8	Kab. Sorong Selatan	IUP	1.141.657.400	-	1.141.657.400
9	Kab. Kaimana	KK	485.838.000	-	485.838.000
	Jumlah		729.643.370.000	16.869.369.225.000	17.599.012.595.000

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto